

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Karanganyar
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Kelas/ semester : X/ I
 Materi Pokok : Nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia
 Alokasi Waktu : 5 x Pertemuan (10JP x 45 menit)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

KI	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.	1.1 Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1.1.1 Menunjukkan perilaku syukur sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 1.1.2 Menunjukkan perilaku beriman

		<p>sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p>
2.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	<p>2.1.1 Menunjukkan perilaku peduli sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>2.1.2 Peserta didik mampu memfilter sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama dengan mencegah narkoba</p> <p>2.1.3 Menunjukkan perilaku toleransi sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>2.1.4 Menunjukkan perilaku gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan HIJABER</p>
3.	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	<p>3.1.1 Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.</p> <p>3.1.2 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang politik.</p> <p>3.1.3 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang politik.</p> <p>3.1.4 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam</p>

		<p>bidang ekonomi.</p> <p>3.1.5 Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.</p> <p>3.1.6 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang sosial-budaya.</p> <p>3.1.7 Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara di bidang sosial-budaya.</p> <p>3.1.8 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan.</p> <p>3.1.9 Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara di bidang pertahanan keamanan.</p>
4.	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	<p>4.1.1 Menyusun laporan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi.</p> <p>4.1.2 Menyajikan laporan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi.</p>

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 3

Sikap Spiritual

1.1.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan perilaku syukur kepada Tuhan YME ketika berhasil mengerjakan sesuatu.

1.1.1.2 Peserta didik mampu menunjukkan perilaku beriman kepada Tuhan YME dengan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran.

Sikap Sosial

2.1.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli di dalam kelas dengan cara menolong teman yang membutuhkan.

2.1.1.2 Peserta didik mampu memfilter sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama dengan mencegah narkoba

2.1.1.3 Peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi di dalam kelas dengan cara menghormati pendapat teman.

2.1.1.4 Peserta didik mampu mempraktekkan sikap gotong royong di luar kelas dengan cara aktif dalam kerja kelompok pelaksanaan HIJABER

Pengetahuan

3.1.4.1 Melalui diskusi dan model pembelajaran *problem based learning* siswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi dengan tepat.

3.1.5.1 Melalui diskusi dan model pembelajaran *problem based learning* siswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi dengan benar.

Keterampilan

4.1.1.1 Peserta didik mampu menyusun laporan hasil analisis tentang keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar.

4.1.1.2 Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil analisis tentang keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar.

D. Materi Pembelajaran

Pertemuan 3

Untuk Indikator:

3.1.4 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi.

3.1.5 Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.

Alokasi Waktu : 2 jp (2 x 45)

Materi reguler

1. Nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.

Materi Remedial

1. Nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.

Materi Pengayaan

Pembelajaran pengayaan diberikan kepada peserta didik yang nilainya sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75 maka peserta didik diberikan penugasan tambahan yang sesuai dengan materi, seperti membuat kliping tentang nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.

Model Pembelajaran

- Pendekatan : *Scientific*
- Model Pembelajaran : *Problem based learning*
- Metode :
 - Memilih satu kartu yang ada di depan sesuai kesepakatan kelompok
 - Penugasan
 - Diskusi
 - Presentasi

E. Langkah-langkah Pembelajaran**Pertemuan ketiga**

No.	Kegiatan Pembelajaran	Waktu (Menit)
1.	Pendahuluan	10
	a. Guru mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. b. Peserta didik berdoa dibawah bimbingan guru.	

	<p>c. Guru melaksanakan presensi untuk mengetahui kehadiran peserta didik.</p> <p>d. Peserta didik menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” agar semangat dalam proses pembelajaran.</p> <p>e. Guru melakukan apersepsi dengan cara memberikan pertanyaan lisan kepada peserta didik tentang kehidupan masyarakat di Jawa dan di luar Jawa yang sangat berbeda. Hal ini akan menggiring peserta didik untuk berfikir bahwa kemakmuran di Indonesia itu belum terwujud secara menyeluruh.</p> <p>f. Menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi pembelajaran, dan model pembelajaran materi yang akan dipelajari hari ini.</p>	
2.	Inti	70
	<p>MENGAMATI</p> <p>a. Peserta didik membaca bahan ajar yang sudah disiapkan guru.</p> <p>b. Peserta didik mengamati gambar “Di papan tulis” Jelaskan Prinsip sosial budaya Berdasarkan Konstitusi”.</p>	
	<p>MENANYA</p> <p>a. Peserta didik dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5-6 orang</p> <p>b. Peserta didik memilih salah satu kartu yang ada di depan yang berisi klu/1 kata inti</p> <p>c. Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait isi dari klu di kartu yang dipilihnya tersebut dan dihubungkan dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang Sosial Budaya.</p>	
	<p>MENGUMPULKAN INFORMASI</p> <p>a. Perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk menerima tugas dari guru dan buku artikel yang berisi tentang artikel yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi:</p>	

	<p>Kelompok I menganalisis artikel tentang: Indomart dan Alfamart Dibiarkan Menjamur, Pemerintahnya di mana?</p> <p>Kelompok II menganalisis artikel tentang: Penertiban Pengemis, Dinas Sosial Cuek.</p> <p>b. Peserta didik mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber belajar seperti, buku, bahan ajar, internet, dan sumber-sumber lainnya untuk merumuskan penyelesaian masalah artikel tersebut.</p>	
	<p>MENGASOSIASI</p> <p>a. Peserta didik mendiskusikan permasalahan sesuai dengan pembagian kasus yang terdapat dalam artikel.</p> <p>b. Peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.</p> <p>c. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap hasil diskusi yang telah dilakukan pada kelompoknya.</p> <p>d. Peserta didik menyusun hasil analisis penyelesaian kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	
	<p>MENGGOMUNIKASIKAN</p> <p>a. Masing-masing kelompok maju ke depan kelas secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi.</p> <p>b. Kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok yang tampil di depan kelas.</p> <p>c. Masing-masing kelompok diminta untuk mengumpulkan laporan hasil diskusinya dalam bentuk laporan tertulis.</p>	
3.	Penutup	10
	<p>a. Peserta didik diberikan penguatan materi oleh guru.</p> <p>b. Peserta didik dibimbing guru menyimpulkan materi pembelajaran.</p> <p>c. Peserta didik diberikan tes tulis dengan menggunakan</p>	

	<p>Lembar Kerja Siswa untuk mengetahui pemahaman materi yang telah disampaikan.</p> <p>d. Peserta didik dibimbing oleh guru untuk melakukan refleksi pembelajaran mengenai:</p> <p>(1) Bagaimana kesan pembelajaran hari ini bagi peserta didik ?</p> <p>(2) Apa manfaat yang diperoleh bagi peserta didik ?</p> <p>(3) Hambatan atau kesulitan apa yang dialami peserta didik?</p> <p>e. Guru mengumumkan peserta didik yang remidi dan pengayaan.</p> <p>f. Guru meminta peserta mempelajari tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial budaya untuk pertemuan yang akan datang.</p> <p>g. Peserta didik dengan dibimbing oleh guru berdoa sebagai penutup pembelajaran.</p>	
--	---	--

F. Penilaian

1. Spiritual

- a. Teknik : Observasi
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
- c. Kisi-kisi :

No	Sikap/Nilai	Butir Instrumen
1.	Perilaku syukur	Terlampir
2.	Perilaku Beriman	

Instrumen : Lihat *Lampiran*

2. Sosial

- a. Teknik : Penilaian Sejawat (antar teman)
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
- c. Kisi-kisi :

No	Sikap/Nilai	Butir Instrumen
1.	Peduli	Terlampir
2.	Toleransi	

3.	Gotong royong	
----	---------------	--

Instrumen : Lihat *Lampiran*

3. Pengetahuan

- a. Teknik : Tes Tertulis
 b. Bentuk Instrumen : Uraian
 c. Kisi-kisi :

No.	Indikator	Butir instrumen
1.	Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi.	1. Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang digunakan dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi! 2. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945!
2.	Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.	3. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945! 4. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945! 5. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945! 6. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 34 UUD NRI 1945!

Instrumen : lihat *Lampiran*

4. Keterampilan

- Teknik : Observasi
 Bentuk Instrumen : Check list
 Kisi-kisi :

No	Keterampilan	Butir Instrumen
1.	Penyajian hasil telaah	Terlampir
2.	Laporan hasil telaah	

Instrumen : lihat *Lampiran*

Kegiatan Remedial

1. Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang digunakan dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi!

2. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945!
3. Jelaskan Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945!
4. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945!
5. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945!
6. Jelaskan Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 34 UUD NRI 1945!

Kegiatan Pengayaan:

Buatlah kliping tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi!

G. Media Pembelajaran

1. Media

- a) Video Di UI, Hamdan Zoelva jelaskan prinsip ekonomi berdasarkan konstitusi.
- b) *Slide power point* tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.
- c) Buku artikel

2. Alat

- a) Laptop
- b) LCD
- c) Kertas

3. Sumber belajar

- Buku Ajar PPKn Kelas X tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.
- LKS PPKn Kelas X tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.
- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMAN 1 Karang

TOYIB MASHURI, S.Pd, M.M
NIP.197105091998031011

Karangan, 04 Januari 2022
Guru Mata Pelajaran

SITI HABIBAH MUTHOHAROH, S.Pd
NIP. –

BAHAN AJAR

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI

Kompetensi Dasar:

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Indikator:

3.1.4 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi.

3.1.5 Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.

Tujuan pembelajaran:

Sikap Spiritual

1.1.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan perilaku syukur kepada Tuhan YME ketika berhasil mengerjakan sesuatu.

1.1.1.2 Peserta didik mampu menunjukkan perilaku beriman kepada Tuhan YME dengan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran.

Sikap Sosial

2.1.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli di dalam kelas dengan cara menolong teman yang membutuhkan.

2.1.1.2 Peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi di dalam kelas dengan cara menghormati pendapat teman.

2.1.1.3 Peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong di dalam kelas dengan cara aktif dalam kerja kelompok.

Pengetahuan

3.1.4.1 Melalui diskusi dan model pembelajaran *problem based learning* siswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi dengan tepat.

3.1.5.1 Melalui diskusi dan model pembelajaran *problem based learning* siswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi dengan benar.

Keterampilan

4.1.1.1 Peserta didik mampu menyusun laporan hasil analisis tentang keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar.

4.1.1.2 Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil analisis tentang keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar.

PEMERINTAHAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI

Nilai-nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara dalam Bidang Ekonomi

Dalam merumuskan kebijakan negara di bidang ekonomi senantiasa berorientasi pada Pancasila sila ke-5 dan ke-2, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu Anak kalimat, *memajukan kesejahteraan umum* dan *mewujudkan keadilan sosial* dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan amanat bagi bangsa Indonesia dalam membangun perekonomian nasional, guna *memajukan kesejahteraan umum* dan *mencerdaskan kehidupan bangsa*.

Bangsa Indonesia harus cerdas untuk mengolah sumber daya nasionalnya serta mengakses semua kemajuan dunia agar mampu menciptakan kesejahteraan umum yang terus berkembang ke arah kemajuan. Usaha menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa haruslah dilandasi lima faktor yakni :

1. Bebasnya bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan ekonomi.
2. Secara politik dan keamanan nasional, bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia harus dilindungi dari segala bentuk gangguan dan ancaman.
3. Kecerdasan kehidupan bangsa, baik individu maupun masyarakat harus terwujud.
4. Aktivitas bangsa untuk ikut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.
5. Mengimplementasikan konsep, prinsip dan nilai Pancasila, sehingga keadilan sosial dapat terwujud secara sempurna.

Jadi kebijakan ekonomi yang dirumuskan itu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kemakmuran rakyat.

Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang Ekonomi

Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara republik Indonesia 1945, yaitu:

a. Pasal 33 Ayat 1:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai realisasi pasal ini dibentuklah koperasi. Bung Hatta sebagai *founding father* atas gagasan koperasi menjelaskan bahwa koperasi salah satu usaha bersama yang sesuai dengan *culture* di Indonesia.

b. Pasal 33 Ayat 2 :

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud pendirian BUMN adalah untuk memenuhi jasa pengabdian, melayani kepentingan umum, dan memupuk pendapatan. Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, BUMN merupakan badan hukum yang tunduk pada segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam rangka mengisi kas negara. Tujuan jangka panjang BUMN adalah membangun ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

c. Pasal 33 Ayat 3:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Realisasi pasal ini adalah pokok pikiran Bung Hatta yang kemudian menjadi kesepakatan nasional menyatakan bahwa bangunan ekonomi nasional Indonesia terdiri dari berbagai pelaku ekonomi yang diwujudkan dalam kelembagaan ekonomi dengan

kedudukan dan fungsi masing-masing yakni : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Pemerintah, (2) Koperasi yang dibentuk oleh rakyat maupun Pemerintah (3) Swasta kecil maupun besar, dan (4) Usaha perorangan, yang semuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Misalnya bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan Migas.

d. Pasal 33 Ayat 4:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Realisasi pasal ini adalah demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia menganut prinsip produksi harus dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mengarah pada pembangunan negara kesejahteraan (*Welfare State*), dengan peran negara yang dominan. Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan akan efektif dengan bimbingan negara.

Lima peran negara yang sangat penting dalam proses perekonomian nasional, yakni:

- (1) Menguasai produksi yang penting bagi negara,
- (2) Menguasai seluruh kekayaan alam nasional,
- (3) Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar,
- (4) Menyelenggarakan sistem jaminan sosial,
- (5) Menyediakan fasilitas dan pelayanan umum.

Dalam mengimplementasikan demokrasi ekonomi, Pemerintah wajib menjadi motor perekonomian Indonesia. Dalam hal ini dapat dibentuk kelembagaan ekonomi campuran antara BUMN dan swasta. Industri rakyat dipacu pelaksanaan dan pertumbuhannya di samping terus memacu pekerjaan publik yang dilaksanakan Pemerintah, seperti listrik, gas, air minum, kereta api, pos dan telekomunikasi, perbankan, pertambangan, serta pengelolaan kekayaan alam lainnya. Usaha koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) didorong untuk mengembangkan diri, misalnya dibantu dengan permodalan, keahlian dan pengelolaan serta dikembangkan melalui sistem kemitraan. Pengawasan pemerintah terhadap dunia usaha dilaksanakan melalui peraturan pembentukan perusahaan, koordinasi, bimbingan produksi, peraturan ketenagakerjaan, serta jika diperlukan pengendalian harga dan lain-lainnya, dengan tetap memperhatikan efisiensi dalam perekonomian. Sistem ekonomi nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menerapkan demokrasi ekonomi, menciptakan sebuah bangunan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial yang dapat disebut sebagai *the social justice state*.

e. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Realisasi pasal ini adalah pemerintah membuka panti-panti yang digunakan untuk memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah mengenal dalam masyarakat saat ini seperti bank, supermarket, mall, bursa saham, bentuk perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Artikel 1

Indomart dan Alfamart Dibiarkan Menjamur, Pemerintahnya di mana?

29 September 2015, 9:03 AM by Christian Jr



MANADO – Terkait keberadaan indomaret dan alfamart yang terus tumbuh subur tanpa mengangtongi ijin di Kota Manado Manado, kembali mendapat tanggapan serius dari pihak DPRD Kota Manado.

Kepada manadoline.com, legislator Manado Syarifudin Saafa mengatakan, instansi terkait jangan tinggal diam dalam menganggapi persoalan ini.

“Kenapa ini dibiarkan menjamur, Pemerintahnya dimana? Dinas terkait harus hadir menanggapi persoalan pengaturan ekonomi seperti ini,” kata Syarifudin Saafa.

Bung Syarif sapaan akrab Politisi PKS ini, meminta dalam menyikapi maraknya gerai minimarket yang tidak memiliki ijin, pemerintah jangan menggunakan pendekatan penertiban.

“Panggil dulu, dikasi tahu prosedur dan aturan yang sebenarnya. Selain yang berhubungan dengan aturan, pemerintah wajib menjelaskan hal yang berhubungan dengan fungsi kerakyatan,” ungkapnya.

Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Manado, melalui Kapala Dinas Dante Tombeg, berjanji pekan kemarin akan melakukan penertiban terhadap sejumlah gerai indomaret dan alfamart yang tidak memiliki ijin. (christian)

Artikel 2

Penertiban Pengemis, Dinas Sosial Cuek

Rabu, 18 Mei 2016 - 03:58:53 WIB



Pengemis Emi (27) menjemur dua orang anak bayinya berusia 7 bulan dan 1,5 tahun, diamankan di Kantor Satpol-PP Padang Panjang, Senin. (APIZ MUHAMMAD)

PADANG PANJANG, HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menertibkan, Ibu yang membawa bayi yang biasa mengemis di Pasar Padang Panjang. Namun, untuk pembinaan lebih lanjut setelah penertiban, pihak Dinas Sosial Padang Panjang seakan lepas tangan dan tak peduli akan permasalahan sosial ‘tersebut.

Informasi yang Haluan himpun di Pasar Padang Panjang, Selasa kemarin, sejak Senin pagi pengunjung pasar dikejutkan dengan adanya seorang pengemis wanita yang membawa dua orang anaknya..

Tidak sepatasnya anak kecil berumur 1,5 tahun dan 7 bulan itu dijemur di tengah keramaian pasar.”Awalnya saya sempat kaget melihat ibu itu membawa dua orang anaknya yang masih kecil untuk mengemis di keramaian pasar, namun tak lama setelah itu, juga ada pengunjung pasar yang mungkin prihatin dan khawatir dengan keadaan anaknya itu, dan langsung menghubungi pihak Satpol-PP untuk meminta bantuan pengamanan,” ujar Ade salah seorang pedagang pasar Padang Panjang.

Terpisah, Kepala Satpol-PP Padang Panjang Joni Aldo, membenarkan bahwasannya personil Pol-PP telah mengamankan pengemis seorang Ibu yang membawa dua orang anak dari pasar Padang Panjang, dan saat ini telah di berada di Kantor Satpol-PP Padang Panjang.

“Setelah mendapatkan laporan dari pengunjung pasar, kita langsung kerahkan personil ke TKP untuk melihat dan memastikan kejadian disana, setelah itu personil Satpol-PP langsung menertibkan dan mengamankan Gepeng tersebut ke Kantor Satpol-PP. Saat ini kita telah kordinasikan dengan pihak Dinas Sosial untuk mencarikan jalan keluar terbaik bagi Gepeng tersebut,” ujar Joni Aldo.

Ironisnya, tidak ada bantuan dan pembinaan lanjutan untuk pengemis yang terjaring tersebut. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang, Emir Emil Elmaulit, saat dikonformasi Haluan terkait menindak lanjuti persoalan gepeng itu menyebutkan, pengemis tersebut bukan lah warga Padangpanjang. Pastinya tidak ada anggaran untuk menindak lanjuti gepeng atau orang terlantar itu.”Kita tidak ada anggaran untuk Gepeng yang bukan warga Padang Panjang,” ujar Emir singkat langsung meninggalkan wartawan.

Tokoh masyarakat Kampung Manggis Hendri G mengecam sikap pihak Dinas Sosial itu karena Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 sudah menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

“Tidak adanya anggaran yang dipagukan teruntuk bagi orang fakir miskin dan anak-anak terlantar pada Disosnaker Padang-panjang ini sangat aneh. Sepertinya tidak ada kepedulian dari instansi terkait yang bernaung di dalam pemerintahan. Kita minta kepala daerah turun untuk menangani persoalan yan menyangkut rakyat akar rumput ini,” tegasnya. Sementara, Emi (27) pengemis yang terjaring di Pasar Padang Panjang dengan membawa dua balita ini mengaku asal Tanjung Barulak Tanah Datar.

Emi mengatakan, ia terpaksa membawa anaknya Alif (1,5 tahun) dan Yanti (7 bulan) mengemis. “Hanya ini cara saya untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan keluarga pak, di rumah pun suami hanya sibuk bermain layangan. Tidak mungkin saya tinggalkan kedua anak saya dirumah,” terangnya saat di jumpai Haluan di kantor Satpol-PP Padang Panjang.

Sekda Padang Panjang Edwar Juliartha yang didampingi Asisten II Pemko Padangpanjang Yas Edizarwin menanggapi persoalan gepeng tersebut menilai, ada anggaran yang dipagukan di instansi terkait.”Biasanya anggaran untuk kasus gepeng ini ada. Gepeng ataupun orang terlantar akan diberikan pembinaan serta diantar pada pada keluarganya,” tambah Yas Edizawin. **(h/mg-pis)**

LAMPIRAN PENILAIAN

1) Sikap Spiritual

Perilaku Syukur

- a. Teknik: Observasi
- b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi

Lembar Observasi Perilaku Syukur

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah rentan skor 1-4 pada kolom aspek penilaian sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai dengan aspek yang dinilai

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Lembar observasi sikap spiritual

No.	Nama	Aspek Penilaian		Nilai	Keterangan Aspek Penilaian
		A	B		
					A.Mengungkapkan perilaku syukur dapat hadir dalam KBM. B. Mengungkapkan perilaku syukur dapat hidup dalam dalam persatuan.

Petunjuk Penghitungan Penilaian Sikap Spiritual

1. Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Sikap Spriritual = B
2. Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\frac{\text{skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 4 = \text{nilai}$$

3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:

Sangat Baik (SB)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $3,5 < \text{skor akhir} = 4$
Baik (B)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $2,5 < \text{skor akhir} \leq 3,5$
Cukup (C)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $1,5 < \text{skor akhir} \leq 2,5$
Kurang (K)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $1 = \text{skor akhir} \leq 1,5$

Perilaku Beriman

Lembar Observasi Perilaku Beriman

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah rentan skor 1-4 pada kolom aspek penilaian sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai dengan aspek yang dinilai

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1= tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Lembar observasi sikap spiritual

No.	Nama	Aspek Penilaian		Nilai	Keterangan Aspek Penilaian
		A	B		
					a. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran.
					b. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau

Petunjuk Penghitungan Penilaian Sikap Spriritual

1. Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Sikap Spriritual = B
2. Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\frac{\text{skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 4 = \text{nilai}$$

3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:

Sangat Baik (SB)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $3,5 < \text{skor akhir} = 4$
Baik (B)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $2,5 < \text{skor akhir} \leq 3,5$
Cukup (C)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $1,5 < \text{skor akhir} \leq 2,5$
Kurang (K)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $1 = \text{skor akhir} \leq 1,5$

2) Sikap sosial

Peduli

Pedoman Observasi Peduli

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh teman untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam bertoleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas :
 Tanggal Pengamatan :
 Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Menolong teman yang membutuhkan					
2	Mendahulukan kepentingan umum					
3	Membuang sampah pada tempatnya					
4	Simpati terhadap orang lain					
Jumlah Skor						

Petunjuk Penghitungan Penilaian Sikap Spiritual

1. Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Sikap Spriritual = B
2. Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\frac{\text{skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 4 = \text{nilai}$$

3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:
 - Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: $3,5 < \text{skor akhir} = 4$
 - Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: $2,5 < \text{skor akhir} \leq 3,5$
 - Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: $1,5 < \text{skor akhir} \leq 2,5$
 - Kurang (K) : apabila memperoleh Skor Akhir: $1 = \text{skor akhir} \leq 1,5$

Toleransi

Pedoman Observasi Sikap Toleransi

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru teman menilai sikap sosial peserta didik dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

Ya = apabila siswa menunjukkan perbuatan sesuai dengan sikap yang diamati

Tidak = apabila siswa tidak menunjukkan perbuatan sesuai dengan sikap yang diamati

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Menghormati pendapat teman					
2	Tidak memaksakan kehendak					
3	Bergaul tanpa membeda-bedakan					
4	Memaafkan kesalahan orang lain					
Jumlah Skor						

Petunjuk Penghitungan Penilaian Sikap Spiritual

1. Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Sikap Spriritual = B
2. Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\frac{\text{skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 4 = \text{nilai}$$

3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:
 - Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: $3,5 < \text{skor akhir} = 4$
 - Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: $2,5 < \text{skor akhir} \leq 3,5$
 - Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: $1,5 < \text{skor akhir} \leq 2,5$
 - Kurang (K) : apabila memperoleh Skor Akhir: $1 = \text{skor akhir} \leq 1,5$

Gotong Royong

Pedoman Observasi Sikap Gotong Royong

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh teman untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas :

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok :

No	Aspek Pengamatan	Skor				Ket
		1	2	3	4	
1	Melaksanakan tugas kelompok dengan baik					
2	Bekerjasama dengan sukarela					
3	Aktif dalam kerja kelompok					
4	Menyusun jawaban bersama-sama					
Jumlah Skor						

Petunjuk Penghitungan Penilaian Sikap Spiritual

- Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Sikap Spriritual = B
- Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\frac{\text{skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 4 = \text{nilai}$$

- Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:

Sangat Baik (SB) : apabila memperoleh Skor Akhir: $3,5 < \text{skor akhir} = 4$
 Baik (B) : apabila memperoleh Skor Akhir: $2,5 < \text{skor akhir} \leq 3,5$
 Cukup (C) : apabila memperoleh Skor Akhir: $1,5 < \text{skor akhir} \leq 2,5$
 Kurang (K) : apabila memperoleh Skor Akhir: $1 = \text{skor akhir} \leq 1,5$

3) Pengetahuan

Teknik: Tes tertulis

Bentuk Instrumen: Uraian

No.	Indikator	Butir instrumen
-----	-----------	-----------------

1.	Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi.	1. Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang digunakan dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi!
2.	Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.	2. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945! 3. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945! 4. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945! 5. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945! 6. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 34 UUD NRI 1945!

Kunci Jawaban:

1. Nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi adalah Pancasila sila ke-5 dan ke-2 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kebijakan ekonomi yang dirumuskan itu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kemakmuran rakyat sehingga semua rakyat bisa merasakan perekonomian yang baik
2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai realisasi pasal ini dibentuklah koperasi. Bung Hatta sebagai *founding father* atas gagasan koperasi menjelaskan bahwa koperasi salah satu usaha bersama yang sesuai dengan *culture* di Indonesia.
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud pendirian BUMN adalah untuk memenuhi jasa pengabdian, melayani kepentingan umum, dan

memupuk pendapatan. Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, BUMN merupakan badan hukum yang tunduk pada segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam rangka mengisi kas negara. Tujuan jangka panjang BUMN adalah membangun ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

4. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Realisasi pasal ini adalah pokok pikiran Bung Hatta yang kemudian menjadi kesepakatan nasional menyatakan bahwa bangunan ekonomi nasional Indonesia terdiri dari berbagai pelaku ekonomi yang diwujudkan dalam kelembagaan ekonomi dengan kedudukan dan fungsi masing-masing yakni : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Pemerintah, (2) Koperasi yang dibentuk oleh rakyat maupun Pemerintah (3) Swasta kecil maupun besar, dan (4) Usaha perorangan, yang semuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Misalnya bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan Migas.
5. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Realisasi pasal ini adalah demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia menganut prinsip produksi harus dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mengarah pada pembangunan negara kesejahteraan (*Welfare State*), dengan peran negara yang dominan.
6. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Realisasi pasal ini adalah pemerintah membuka panti-panti yang digunakan untuk memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

RUBRIK PENILAIAN LKS

No	Skor Maksimal	Kriteria Jawaban	Skor
1.	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10

		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	15
2	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap bahasa yang jelas	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	15
3.	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	15
4.	20	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	5-9
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	10-14
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	15-19
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	20
5.	20	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	5-9
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	10-14
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	15-19
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	20
6.	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	15
Total skor/skor maksimal			100

Rumus Penilaian :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Total skor maksimal}} \times 4$$

Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Pengetahuan = B-

Kategori nilai pengetahuan peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:

A = Apabila memperoleh Skor Akhir: 3,85 – 4,00

A- = Apabila memperoleh Skor Akhir: 3,51 – 3,84

B+ = Apabila memperoleh Skor Akhir: 3,18 – 3,50

- B = Apabila memperoleh Skor Akhir: 2,85 – 3,17
 B- = Apabila memperoleh Skor Akhir: 2,51 – 2,84
 C+= Apabila memperoleh Skor Akhir: 2,18 – 2,50
 C = Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,85 – 2,17
 C- = Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,51 – 1,84
 D+= Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,18 – 1,50
 D = Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,00 – 1,17

Kegiatan Pengayaan:

1. Buatlah klipng tentang perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi!

Kunci Jawaban:

KOPERASI KUNCI SUKSES HADAPI MEA

Editor : Agus Sigit | Minggu, 24 Januari 2016 | 21:15 WIB



SLEMAN (KRjogja.com) - Di era perdagangan bebas negara-negara ASEAN atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), koperasi sebagai badan usaha milik bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan bisa menjadi kunci sukses pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut Asisten Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Salehan SMM, di negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Italia, koperasi telah menjelma sebagai badan usaha yang menguasai bidang-bidang strategis.

"Hampir semua bisnis di sektor pertanian di Jepang berbadan hukum koperasi. Itu artinya koperasi memegang peran penting dalam perekonomian negara," terang Salehan saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-17 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Prima Artha di Resor Merapi Ngaglik Sleman, Minggu (24/1/2016). Menurut Salehan untuk membangun sebuah koperasi yang sehat diperlukan kedisiplinan dan tertib dalam hal organisasi dan kelembagaan, usaha, keuangan serta administrasi. Sebuah koperasi juga harus berjalan sesuai AD/ART yang telah ditentukan dengan tidak menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Selain itu, para anggota harus proaktif menentukan arah usaha koperasi melalui forum RAT. "Koperasi itu bukan milik pengurus tapi milik anggota,' tegasnya.

Rubrik penilaian:

No	Nama	Aspek penilaian				Jumlah	Nilai
		Kejelasan isi berita (1-4)	Sumber Artikel (1-4)	Estetika (1-4)	Ketepatan waktu (1-4)		
1.	Susi	3	4	3	2	12	75 (Baik)
2.							

dst							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Skor terentang antara 1-4

1 = kurang

2 = cukup

Nilai : $\frac{\text{Jumlah skor}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$

Skor maksimal

3 = baik

4 = amat baik

Kegiatan remedial:

7. Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang digunakan dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi!
8. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945!
9. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945!
10. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945!
11. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945!
12. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 34 UUD NRI 1945!

Kunci Jawaban:

1. Nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi adalah Pancasila sila ke-5 dan ke-2 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kebijakan ekonomi yang dirumuskan itu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kemakmuran rakyat sehingga semua rakyat bisa merasakan perekonomian yang baik
2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai realisasi pasal ini dibentuklah koperasi. Bung Hatta sebagai *founding father* atas gagasan koperasi menjelaskan bahwa koperasi salah satu usaha bersama yang sesuai dengan *culture* di Indonesia.
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud pendirian BUMN adalah untuk memenuhi jasa pengabdian, melayani kepentingan umum, dan memupuk pendapatan. Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, BUMN merupakan badan

hukum yang tunduk pada segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam rangka mengisi kas negara. Tujuan jangka panjang BUMN adalah membangun ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

4. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Realisasi pasal ini adalah pokok pikiran Bung Hatta yang kemudian menjadi kesepakatan nasional menyatakan bahwa bangunan ekonomi nasional Indonesia terdiri dari berbagai pelaku ekonomi yang diwujudkan dalam kelembagaan ekonomi dengan kedudukan dan fungsi masing-masing yakni : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Pemerintah, (2) Koperasi yang dibentuk oleh rakyat maupun Pemerintah (3) Swasta kecil maupun besar, dan (4) Usaha perorangan, yang semuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Misalnya bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan Migas.
5. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Realisasi pasal ini adalah demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia menganut prinsip produksi harus dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mengarah pada pembangunan negara kesejahteraan (*Welfare State*), dengan peran negara yang dominan.
6. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Realisasi pasal ini adalah pemerintah membuka panti-panti yang digunakan untuk memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

RUBRIK PENILAIAN REMIDI

Nomor Soal	Skor
1	10
2	10
3	15

4	15
5	15
6	10

Total skor = 75

4) Keterampilan

Penilaian Aspek Penyajian dan Laporan Hasil Diskusi

A. Petunjuk Umum

1. Instrumen penilaian keterampilan ini berupa *lembar observasi*.
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar, peserta didik yang dinilai.

B. Petunjuk Khusus

Berdasarkan pengamatan anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap setiap peserta didik anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4 = apabila **Selalu** melakukan perilaku yang diamati
 3 = apabila **Sering** melakukan perilaku yang diamati
 2 = apabila **Kadang-kadang** melakukan perilaku yang diamati
 1 = apabila **Tidak pernah** melakukan perilaku yang diamati

C. Lembar Observasi

Lembar Penilaian Penyajian dan Laporan Hasil Telaah

Kelas/Semester : X/1

Materi Pokok : Nilai-nilai pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan

negara dalam bidang ekonomi

- Soal : 1. Coba analisa artikel “Indomart dan Alfamart Dibiarkan Menjamur, Pemerintahnya di mana?” dibawah ini dan hubungkan dengan materi yang dipelajari hari ini!
 2. Coba analisa artikel “Penertiban Pengemis, Dinas Sosial Cuek” dibawah ini dan hubungkan dengan materi yang dipelajari hari ini!

No.	Aspek Penilaian	Penskoran					
		1	2	3	4	5	6
A.	Penyajian						
	1. Menanya/Menjawab						
	2. Argumentasi						
B.	Laporan						
	1. Substansi						
	2. Sistematika						
	3. Estetika						
	4. Penggunaan Bahasa						
Jumlah Skor							
Skor Akhir							
Komentar Guru		Tanda Tangan					
		<u>Anisya Zulha, S.Pd.</u>					

Pedoman Penskoran (*rubric penilaian*)

No.	Aspek	Penskoran
1	Menanya/ Menjawab	Skor 4, apabila selalu menjawab/menanya Skor 3, apabila sering menjawab/menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab/menanya Skor 1, apabila tidak pernah menjawab/menanya.
2	Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Substansi	Skor 4, apabila isi sesuai dengan materi dan lengkap Skor 3, apabila isi sesuai dengan materi dan kurang lengkap Skor 2, apabila isi sesuai dengan materi dan tidak lengkap Skor 1, apabila isi tidak sesuai dengan materi dan tidak lengkap
4	Sistematika	Skor 4, apabila tata urutan substansi runtut dan jelas Skor 3, apabila tata urutan substansi runtut dan kurang jelas Skor 2, apabila tata urutan substansi runtut dan tidak jelas Skor 1, apabila tata urutan substansi tidak runtut dan tidak jelas.
5	Estetika	Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik Skor 2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik
6	Penggunaan Bahasa	Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami Skor 2, apabila menggunakan bahasa sesuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami Skor 1, apabila menggunakan bahasa tidak sesuai EYD, penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami

D. Petunjuk Penghitungan Penilaian Keterampilan

1. Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Sikap Sosial = B
2. Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\frac{\text{skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 4 = \text{nilai}$$

3. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Kategori nilai sikap peserta didik yaitu:

Sangat Baik (SB)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $3,5 < \text{skor akhir} = 4$
Baik (B)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $2,5 < \text{skor akhir} \leq 3,5$
Cukup (C)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $1,5 < \text{skor akhir} \leq 2,5$
Kurang (K)	: apabila memperoleh Skor Akhir: $1 = \text{skor akhir} \leq 1,5$

LEMBAR KERJA SISWA

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI

Kompetensi Dasar:

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Indikator:

3.1.6 Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi.

3.1.7 Menganalisis nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang ekonomi.

Tujuan pembelajaran:

Sikap Spiritual

1.1.1.3 Peserta didik mampu menunjukkan perilaku syukur kepada Tuhan YME ketika berhasil mengerjakan sesuatu.

1.1.1.4 Peserta didik mampu menunjukkan perilaku beriman kepada Tuhan YME dengan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran.

Sikap Sosial

2.1.1.1 Peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli di dalam kelas dengan cara menolong teman yang membutuhkan.

2.1.1.2 Peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi di dalam kelas dengan cara menghormati pendapat teman.

2.1.1.3 Peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong di dalam kelas dengan cara aktif dalam kerja kelompok.

Pengetahuan

3.1.4.1 Melalui diskusi dan model pembelajaran *problem based learning* siswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi dengan tepat.

3.1.5.1 Melalui diskusi dan model pembelajaran *problem based learning* siswa mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi dengan benar.

Keterampilan

4.1.1.1 Peserta didik mampu menyusun laporan hasil analisis tentang keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar.

4.1.1.2 Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil analisis tentang keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan benar.

KEGIATAN INDIVIDU

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang digunakan dalam merumuskan kebijakan di bidang ekonomi!

Jawaban Nomor 1

.....
.....
.....

2. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945!

Jawaban Nomor 1

.....
.....
.....

3. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945!

Jawaban Nomor 1

.....
.....
.....

4. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945!

Jawaban Nomor 1

.....
.....
.....

5. Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945!

Jawaban Nomor 1

.....
.....
.....

6. Jelaskan Jelaskan perwujudan landasan operasional sistem ekonomi menurut pasal 34 UUD NRI 1945!

Jawaban Nomor 1

.....
.....
.....

Kunci Jawaban:

7. Nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi adalah Pancasila sila ke-5 dan ke-2 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kebijakan ekonomi yang dirumuskan itu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kemakmuran rakyat sehingga semua rakyat bisa merasakan perekonomian yang baik
8. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai realisasi pasal ini dibentuklah koperasi. Bung Hatta sebagai *founding father* atas gagasan koperasi menjelaskan bahwa koperasi salah satu usaha bersama yang sesuai dengan *culture* di Indonesia.
9. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maksud pendirian BUMN adalah untuk memenuhi jasa pengabdian, melayani kepentingan umum, dan memupuk pendapatan. Sebagai perusahaan yang dimiliki negara, BUMN merupakan badan hukum yang tunduk pada segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam rangka mengisi kas negara. Tujuan jangka panjang BUMN adalah membangun ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur.
10. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Realisasi pasal ini adalah pokok pikiran Bung Hatta yang kemudian menjadi kesepakatan nasional menyatakan bahwa bangunan ekonomi nasional Indonesia terdiri dari berbagai pelaku ekonomi yang diwujudkan dalam kelembagaan ekonomi dengan kedudukan dan fungsi masing-masing yakni : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola Pemerintah, (2) Koperasi yang dibentuk oleh rakyat maupun Pemerintah (3) Swasta kecil maupun besar, dan (4) Usaha perorangan, yang semuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Misalnya bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal kuasa pertambangan Migas.
11. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional. Realisasi pasal ini adalah demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia menganut prinsip produksi harus dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang mengarah pada pembangunan negara kesejahteraan (*Welfare State*), dengan peran negara yang dominan.

12. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Realisasi pasal ini adalah pemerintah membuka panti-panti yang digunakan untuk memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar..

RUBRIK PENILAIAN LKS

No	Skor Maksimal	Kriteria Jawaban	Skor
1.	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	15
2.	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap bahasa yang jelas	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	15
3.	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	15
4.	20	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	5-9
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	10-14
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	15-19
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	20
5.	20	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	5-9
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	10-14
		Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	15-19
		Jawaban sesuai dengan pertanyaan, penjelasan lengkap	20
6.	15	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	3-6
		Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	7-10

	Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	11-14
	Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, penjelasan kurang lengkap	15
Total skor/skor maksimal		100

Rumus Penilaian :

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Total skor maksimal}} \times 4$$

Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Pengetahuan = B-

Kategori nilai pengetahuan peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:

- A = Apabila memperoleh Skor Akhir: 3,85 – 4,00
- A- = Apabila memperoleh Skor Akhir: 3,51 – 3,84
- B+ = Apabila memperoleh Skor Akhir: 3,18 – 3,50
- B = Apabila memperoleh Skor Akhir: 2,85 – 3,17
- B- = Apabila memperoleh Skor Akhir: 2,51 – 2,84
- C+ = Apabila memperoleh Skor Akhir: 2,18 – 2,50
- C = Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,85 – 2,17
- C- = Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,51 – 1,84
- D+ = Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,18 – 1,50
- D = Apabila memperoleh Skor Akhir: 1,00 – 1,17

KEGIATAN KELOMPOK

Langkah - langkah :

- Buatlah 2 kelompok masing – masing berjumlah 5-6 orang!
- Cermati artikel dibawah ini dan hubungkan dengan materi pembelajaran hari ini!
- Sarikan apa isi artikel dibawah ini!
- Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara dalam Bidang Ekonomi menurut artikel tersebut!
- Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapinya?
- Diskusikan dengan teman satu kelompok!
- Presentasikan didepan kelas!
- Kelompok lainnya memberikan tanggapan/pertanyaan/saran terhadap kelompok yang tampil!

Artikel 1

Indomart dan Alfamart Dibiarkan Menjamur, Pemerintahnya di mana?

29 September 2015, 9:03 AM by Christian Jr



MANADO – Terkait keberadaan indomaret dan alfamart yang terus tumbuh subur tanpa mengangtongi ijin di Kota Manado Manado, kembali mendapat tanggapan serius dari pihak DPRD Kota Manado.

Kepada manadoline.com, legislator Manado Syarifudin Saafa mengatakan, instansi terkait jangan tinggal diam dalam menganggapi persoalan ini.

“Kenapa ini dibiarkan menjamur, Pemerintahnya dimana? Dinas terkait harus hadir menanggapi persoalan pengaturan ekonomi seperti ini,” kata Syarifudin Saafa.

Bung Syarif sapaan akrab Politisi PKS ini, meminta dalam menyikapi maraknya gerai minimarket yang tidak memiliki ijin, pemerintah jangan menggunakan pendekatan penertiban.

“Panggil dulu, dikasi tahu prosedur dan aturan yang sebenarnya. Selain yang berhubungan dengan aturan, pemerintah wajib menjelaskan hal yang berhubungan dengan fungsi kerakyatan,” untkapnya.

Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Manado, melalui Kapala Dinas Dante Tombeg, berjanji pekan kemarin akan melakukan penertiban terhadap sejumlah gerai indomaret dan alfamart yang tidak memiliki ijin. (christian)

Artikel 2

Penertiban Pengemis, Dinas Sosial Cuek

Rabu, 18 Mei 2016 - 03:58:53 WIB



Pengemis Emi (27) menjemur dua orang anak bayinya berusia 7 bulan dan 1,5 tahun, diamankan di Kantor Satpol-PP Padang Panjang, Senin. (APIZ MUHAMMAD)

PADANG PANJANG, HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menertibkan, Ibu yang membawa bayi yang biasa mengemis di Pasar Padang Panjang. Namun, untuk pembinaan lebih lanjut setelah penertiban, pihak Dinas Sosial Padang Panjang seakan lepas tangan dan tak peduli akan permasalahan sosial ‘tersebut.

Informasi yang Haluan himpun di Pasar Padang Panjang, Selasa kemarin, sejak Senin pagi pengunjung pasar dikejutkan dengan adanya seorang pengemis wanita yang membawa dua orang anaknya..

Tidak sepatasnya anak kecil berumur 1,5 tahun dan 7 bulan itu dijemur di tengah keramaian pasar.”Awalnya saya sempat kaget melihat ibu itu membawa dua orang anaknya yang masih kecil untuk mengemis di keramaian pasar, namun tak lama setelah itu, juga ada pengunjung pasar yang mungkin prihatin dan khawatir dengan keadaan anaknya itu, dan langsung menghubungi pihak Satpol-PP untuk meminta bantuan pengamanan,” ujar Ade salah seorang pedagang pasar Padang Panjang.

Terpisah, Kepala Satpol-PP Padang Panjang Joni Aldo, membenarkan bahwasannya personil Pol-PP telah mengamankan pengemis seorang Ibu yang membawa dua orang anak dari pasar Padang Panjang, dan saat ini telah di berada di Kantor Satpol-PP Padang Panjang.

“Setelah mendapatkan laporan dari pengunjung pasar, kita langsung kerahkan personil ke TKP untuk melihat dan memastikan kejadian disana, setelah itu personil Satpol-PP langsung menertibkan dan mengamankan Gepeng tersebut ke Kantor Satpol-PP. Saat ini kita telah kordinasikan dengan pihak Dinas Sosial untuk mencari jalan keluar terbaik bagi Gepeng tersebut,” ujar Joni Aldo.

Ironisnya, tidak ada bantuan dan pembinaan lanjutan untuk pengemis yang terjaring tersebut. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang, Emir Emil Elmaulit, saat dikonformasi Haluan terkait menindak lanjuti persoalan gepeng itu menyebutkan, pengemis tersebut bukan lah warga Padangpanjang. Pastinya tidak ada anggaran untuk menindak lanjuti gepeng atau orang terlantar itu.”Kita tidak ada anggaran untuk Gepeng yang bukan warga Padang Panjang,” ujar Emir singkat langsung meninggalkan wartawan.

Tokoh masyarakat Kampung Manggis Hendri G mengecam sikap pihak Dinas Sosial itu karena Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 sudah menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

“Tidak adanya anggaran yang dipagukan teruntuk bagi orang fakir miskin dan anak-anak terlantar pada Disosnaker Padang-panjang ini sangat aneh. Sepertinya tidak ada kepedulian dari instansi terkait yang bernaung di dalam pemerintahan. Kita minta kepala daerah turun untuk menangani persoalan yan menyangkut rakyat akar rumput ini,” tegasnya. Sementara, Emi (27) pengemis yang terjaring di Pasar Padang Panjang dengan membawa dua balita ini mengaku asal Tanjung Barulak Tanah Datar.

Emi mengatakan, ia terpaksa membawa anaknya Alif (1,5 tahun) dan Yanti (7 bulan) mengemis. “Hanya ini cara saya untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan keluarga pak, di rumah pun suami hanya sibuk bermain layangan. Tidak mungkin saya tinggalkan kedua anak saya dirumah,” terangnya saat di jumpai Haluan di kantor Satpol-PP Padang Panjang.

Sekda Padang Panjang Edwar Juliartha yang didampingi Asisten II Pemko Padangpanjang Yas Edizarwin menanggapi persoalan gepeng tersebut menilai, ada anggaran yang dipagukan di instansi terkait.”Biasanya anggaran untuk kasus gepeng ini ada. Gepeng ataupun orang terlantar akan diberikan pembinaan serta diantar pada pada keluarganya,” tambah Yas Edizawin. **(h/mg-pis)**

KUNCI JAWABAN

Artikel 1

- a. Sari dari artikel tersebut adalah: indomaret dan alfamart yang terus tumbuh subur tanpa ada yang mengawasi dan tanpa mengangtongi ijin. Hal ini sangat merugikan semua masyarakat di Kota Manado dan mendapat tanggapan serius dari pihak DPRD Kota Manado.
- b. Artikel ini menggambarkan kalau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara itu tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai realisasi pasal ini dibentuklah koperasi. Seharusnya bukan indomart dan alfamart yang tumbuh subur di Indonesia, melainkan koperasi. Sehingga keuntungan yang didapat itu bukan dimiliki oleh pengusaha ataupun pihak asing, melainkan untuk kemakmuran bersama semua masyarakat.
- c. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi hal ini adalah membatasi indomart dan alfamart itu agar tidak terlalu banyak ada di masyarakat, dan mengawasi agar lokasi berdirinya indomart dan alfamart itu tidak berada berdekatan dengan perkampungan penduduk sehingga tidak mematikan toko-toko kecil penduduk. Serta pemerintah sebaiknya memperluas pendirian koperasi hingga di desa-desa dan mengaktifkannya untuk kepentingan bersama masyarakat.

Artikel 2

- a. Sari dari artikel tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menertibkan, Ibu yang membawa bayi yang biasa mengemis di Pasar Padang Panjang. Namun, untuk pembinaan lebih lanjut setelah penertiban, pihak Dinas Sosial Padang Panjang seakan lepas tangan dan tak peduli akan permasalahan sosial.
- b. Artikel ini menggambarkan kalau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara itu tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Disini digambarkan bahwa setelah gepeng itu ditangkap tidak ada tindak lanjut untuk membinanya dengan dalil gepeng tersebut bukan warga Padang Panjang jadi tidak ada anggaran untuk Gepeng yang bukan warga Padang Panjang.
- c. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki sistem dinas sosial yang ada di setiap daerah agar gepeng dan anak-anak terlantar bisa di arahkan dan dibina oleh dinas soial dimanapun tidak peduli asal daerah masing-masing. Kalau perlu diberikan bekal keterampilan untuk bisa menghasilkan uang dan diberikan modal untuk memulai suatu usaha.

RUBRIK PENILAIAN KELOMPOK

Lembar Penilaian Penyajian dan Laporan Hasil Telaah

- Kelas/Semester : X/1
 Materi Pokok : Nilai-nilai pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang ekonomi
 Soal : 1. Coba analisa artikel “Indomart dan Alfamart Dibiarkan Menjamur, Pemerintahnya di mana?” dibawah ini dan hubungkan dengan materi yang dipelajari hari ini!
 2. Coba analisa artikel “Penertiban Pengemis, Dinas Sosial Cuek” dibawah ini dan hubungkan dengan materi yang dipelajari hari ini!

No.	Aspek Penilaian	Penskoran					
		1	2	3	4	5	6
A.	Penyajian						
	3. Menanya/Menjawab						
	4. Argumentasi						
B.	Laporan						
	5. Substansi						
	6. Sistematika						
	7. Estetika						
	8. Penggunaan Bahasa						
Jumlah Skor							
Skor Akhir							
Komentar Guru		Tanda Tangan					
		<u>Anisya Zulha, S.Pd.</u>					

Pedoman Penskoran (rubric penilaian)

No.	Aspek	Penskoran
1	Menanya/Menjawab	Skor 4, apabila selalu menjawab/menanya Skor 3, apabila sering menjawab/menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab/menanya Skor 1, apabila tidak pernah menjawab/menanya.
2	Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Substansi	Skor 4, apabila isi sesuai dengan materi dan lengkap Skor 3, apabila isi sesuai dengan materi dan kurang lengkap Skor 2, apabila isi sesuai dengan materi dan tidak lengkap Skor 1, apabila isi tidak sesuai dengan materi dan tidak lengkap
4	Sistematika	Skor 4, apabila tata urutan substansi runtut dan jelas Skor 3, apabila tata urutan substansi runtut dan kurang jelas Skor 2, apabila tata urutan substansi runtut dan tidak jelas

		Skor 1, apabila tata urutan substansi tidak runtut dan tidak jelas.
5	Estetika	Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik Skor 2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik
6	Penggunaan Bahasa	Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami Skor 2, apabila menggunakan bahasa sesuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami Skor 1, apabila menggunakan bahasa tidak sesuai EYD, penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami

E. Petunjuk Penghitungan Penilaian Keterampilan

4. Kriteria Ketuntasan Minimal Aspek Sikap Sosial = B
5. Rumus Penghitungan Skor Akhir

$$\frac{\text{skor diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimal}} \times 4 = \text{nilai}$$

6. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud No 104 Tahun 2014 yaitu:

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Kategori nilai sikap peserta didik yaitu:

- | | |
|------------------|---|
| Sangat Baik (SB) | : apabila memperoleh Skor Akhir: $3,5 < \text{skor akhir} = 4$ |
| Baik (B) | : apabila memperoleh Skor Akhir: $2,5 < \text{skor akhir} \leq 3,5$ |
| Cukup (C) | : apabila memperoleh Skor Akhir: $1,5 < \text{skor akhir} \leq 2,5$ |
| Kurang (K) | : apabila memperoleh Skor Akhir: $1 = \text{skor akhir} \leq 1,5$ |

